

Politik Tata Ruang Pesisir dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali

Coastal Spatial Planning Politics and Customary Law Resilience: A Case Study of Bendega Institutions in the Vortex of Balinese Tourism Development

Andy Rasyadi

Lecturer at Aquatic Resources Management, Faculty of Marine Science and Fisheries, Udayana
University, Bali, Indonesia
email: andy.rasyadi@unud.ac.id

Submitted: July 29, 2025 | Accepted: August 21, 2025 | Published: September 2, 2025

Abstract: *Bendega is a traditional coastal institution in Bali, grounded in the Tri Hita Karana philosophy, and it plays a crucial role in marine resource governance. Despite gaining formal legitimacy through Bali Provincial Regulation No. 11 of 2017, this institution faces serious challenges in the form of tourism expansion, environmental degradation, climate change, and weak policy implementation at the local level. This research employs a qualitative approach that includes a literature review and analysis based on the methods of Miles & Huberman, utilizing data from publications, reports, and case studies conducted in Tuban, Serangan, Jimbaran, Buleleng, and Nusa Dua. The study findings indicate that Bendega holds a fundamental position equivalent to Subak in the agrarian system, with functions extending beyond the economic to religious and socio-cultural dimensions. However, its existence is vulnerable to conflicts of interest with the tourism sector, marine pollution, and other ecological pressures that erode the socio-economic basis of fishermen. On the other hand, adaptive innovations such as ecotourism, mangrove rehabilitation, seahorse cultivation, and processed seafood products have emerged, strengthening community resilience. The research conclusion confirms that the sustainability of Bendega depends on strengthened policy implementation, integration of customary and state law, and economic diversification based on local wisdom that aligns with the principles of socio-ecological sustainability.*

Keywords: *Bendega, Customary Law, Local Wisdom, Coastal Management, Spatial Planning Politics*

Abstrak: Bendega adalah kelembagaan tradisional pesisir Bali yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana* dan berperan penting dalam tata kelola sumber daya laut. Meskipun telah memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017, kelembagaan ini menghadapi tantangan serius berupa ekspansi pariwisata, degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif melalui literature review dan analisis Miles & Huberman, dengan data dari publikasi, laporan, dan studi kasus di Tuban, Serangan, Jimbaran, Buleleng, dan Nusa Dua. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bendega memiliki posisi fundamental setara dengan Subak dalam sistem agraria, dengan fungsi yang melampaui aspek ekonomi menuju dimensi religius dan sosio-kultural. Namun, keberadaannya rentan terhadap konflik kepentingan dengan sektor pariwisata, pencemaran laut, dan tekanan ekologis lain yang mengikis basis sosial ekonomi nelayan. Di sisi lain, muncul inovasi adaptif seperti ekowisata, rehabilitasi mangrove, budidaya kuda laut, dan produk olahan hasil laut yang memperkuat resiliensi komunitas. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan Bendega bergantung pada penguatan implementasi kebijakan, integrasi hukum adat dan hukum negara, serta diversifikasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang selaras dengan prinsip keberlanjutan sosial-ekologis.

Kata Kunci: Bendega, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pengelolaan Pesisir, Politik Tata Ruang



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License

Pendahuluan

Bendega merupakan kelembagaan tradisional masyarakat pesisir Bali yang telah lama memainkan peran strategis dalam tata kelola perikanan tradisional dan pemanfaatan sumber daya laut. Lembaga ini tidak hanya dipahami sebagai organisasi profesi nelayan, tetapi juga sebagai institusi sosio-kultural dan religius yang melekat dalam struktur masyarakat adat. Perannya seringkali disejajarkan dengan Subak pada sistem agraria darat, sehingga Bendega dapat dipandang sebagai “lembaga agraria maritim” yang berfungsi menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dengan laut (Siki, 2018; Suarjaya, 2022; Wibawa, 2020).

Filosofi Tri Hita Karana menjadi dasar nilai-nilai kelembagaan Bendega, yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesamanya (pawongan), serta manusia dengan lingkungannya (palemahan) (Wibawa, 2020). Dengan kerangka ini, Bendega memiliki mandat yang tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi kelautan, tetapi juga berkaitan dengan pelestarian ekosistem laut dan penguatan identitas kultural masyarakat pesisir. Fungsi-fungsi tersebut sekaligus menegaskan bahwa Bendega merupakan instrumen pengelolaan berbasis komunitas yang adaptif terhadap konteks ekologi dan sosial setempat.

Eksistensi Bendega semakin diperkuat melalui landasan hukum formal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega. Namun, implementasi kebijakan tersebut pada tingkat kabupaten/kota masih menghadapi ketidakmerataan. Tidak semua daerah pesisir memiliki regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur peran dan fungsi Bendega, sehingga terjadi kesenjangan dalam tata kelola kelembagaan di tingkat lokal. Menurut Wibawa (2020), hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang memiliki peraturan turunan tentang Bendega. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya legitimasi kelembagaan di daerah tertentu, sekaligus mengurangi efektivitas Bendega dalam menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis secara berkelanjutan.

Di sisi lain, modernisasi dan pembangunan di wilayah pesisir Bali menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan sektor pariwisata terlihat dari jumlah akomodasi yang mencapai sekitar 5.389 properti selama periode COVID-19 (Sambas et al., 2022), dengan pangsa pasar bisnis perhotelan meningkat sekitar 10% dalam lima tahun terakhir (Ni Nyoman et al., 2019). Kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali pun signifikan, yakni sekitar 54% (Kemenkeu, 2019). Namun, perkembangan tersebut juga membawa dampak negatif berupa ekspansi infrastruktur pesisir, pencemaran lingkungan, peningkatan volume sampah plastik, serta persaingan dengan nelayan modern yang menggunakan alat tangkap destruktif (Darma et al., 2020; Warren, 2023; Widyarsana & Agustina, 2020). Tantangan ini semakin diperparah oleh dampak perubahan iklim global, seperti kenaikan muka air laut dan perubahan pola arus, yang memperbesar risiko bagi ekosistem pesisir (Kusumaningrum et al., 2024). Akumulasi persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus nilai kolektivitas, melemahkan fungsi kelembagaan, serta mengurangi *resiliensi* Bendega sebagai institusi adat pesisir.

Dengan mempertimbangkan tantangan ekologis, sosial, serta kesenjangan regulasi tersebut, kajian mendalam mengenai *resiliensi* kelembagaan Bendega menjadi kebutuhan strategis. Kajian ini penting tidak hanya untuk menelusuri sejarah dan struktur adat yang menopang eksistensi Bendega, tetapi juga untuk menganalisis kapasitas adaptasi kelembagaan dalam merespons tekanan kontemporer. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan kelembagaan Bendega agar mampu berfungsi secara optimal dalam tata kelola sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal, sekaligus berkontribusi pada ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir Bali.

Secara khusus, penelitian ini mencakup: (1) penelusuran sejarah dan asal-usul kelembagaan Bendega, beserta fondasi filosofis yang melandasinya; (2) analisis tantangan aktual yang dihadapi, termasuk dampak modernisasi, ekspansi pariwisata, degradasi lingkungan, serta hambatan dalam implementasi kebijakan; (3) pengkajian kontribusi dan dampak kelembagaan Bendega terhadap tata kelola sumber daya kelautan dan pariwisata di wilayah pesisir; (4) penyajian studi kasus dari wilayah Buleleng, Serangan, Teluk Jimbaran, Nusa Dua, dan Tanjung Benoa guna menggambarkan dinamika lokal; serta (5) rekomendasi kebijakan dan program strategis guna memperkuat keberlanjutan kelembagaan Bendega dan pembangunan pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pelestarian kelembagaan Bendega tidak hanya penting dalam konteks perlindungan profesi nelayan, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya pelestarian identitas budaya, penguatan kearifan maritim lokal, serta pembangunan Bali yang berakar pada nilai dan jati diri masyarakatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun melalui pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) terhadap berbagai sumber informasi yang relevan. Proses ini dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyintesis data mengenai kelembagaan Bendega di Bali, isu-isu yang dihadapinya, serta implikasinya pada pengelolaan sumber daya perikanan dan pariwisata.

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah, laporan penelitian, artikel berita, dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini mencakup studi kasus spesifik tentang Bendega di berbagai wilayah Bali, analisis implementasi kebijakan, serta kajian dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran daring menggunakan mesin pencari seperti Google Scholar, portal jurnal, dan situs resmi pemerintah daerah. Kata kunci yang digunakan antara lain “Bendega Bali”, “awig-awig nelayan”, “perikanan tradisional Bali”, dan “lembaga adat pesisir”. Seluruh dokumen yang ditemukan kemudian dikompilasi, diklasifikasikan berdasarkan tema, dan disusun dalam daftar pustaka lengkap yang dapat ditelusuri kembali oleh penulis lain.

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan mengadopsi kerangka kerja analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1996), yang meliputi tiga alur kegiatan utama yang saling berinteraksi:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Tahap ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber. Data mentah yang beragam, seperti teks panjang dari artikel jurnal, laporan pemerintah, dan berita, direduksi untuk mengekstrak informasi inti yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Uraian Data yang Direduksi:
 - Dari Sejarah dan Asal-Usul: Informasi kronologis tentang pembentukan Bendega, keterkaitannya dengan Desa Adat dan Subak, serta landasan filosofi Tri Hita Karana disarikan. Detail spesifik tentang tanggal atau nama prasasti yang tidak langsung relevan dengan fungsi Bendega saat ini, atau narasi cerita rakyat yang terlalu panjang, direduksi menjadi poin-poin kunci yang menunjukkan akar historis dan budaya.
 - Dari Struktur dan Fungsi: Detail hierarki organisasi Bendega (Prajuru, Krama) dan peran *Awig-Awig* disarikan. Informasi yang terlalu spesifik tentang struktur organisasi pemerintah daerah yang tidak langsung berkaitan dengan Bendega, atau daftar nama pejabat, direduksi.
 - Dari Isu dan Tantangan: Data tentang pencemaran laut, *overfishing*, perubahan iklim, dan kendala implementasi Perda Bendega disarikan. Angka-angka persentase penurunan hasil tangkapan, jumlah ponton yang merusak karang, atau detail teknis tentang jenis limbah yang tidak esensial untuk gambaran umum, direduksi menjadi dampak utamanya. Contoh konflik spesifik disarikan untuk menunjukkan pola konflik yang lebih luas.
 - Dari Implikasi dan Adaptasi: Informasi tentang praktik pengelolaan tradisional (*Awig-Awig*), inisiatif konservasi (penanaman mangrove, budidaya kuda laut), dan diversifikasi mata pencarian (ekowisata, produk olahan) disarikan. Detail operasional yang terlalu teknis atau daftar mitra yang sangat panjang, direduksi menjadi esensi program dan dampaknya.
 - Penyajian Data (Data Display): Setelah data direduksi, informasi yang telah disarikan kemudian diorganisir dan disajikan dalam format yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel komparatif, dan poin-poin tematik. Tujuan penyajian data adalah untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang valid dan memfasilitasi pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.
 - Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification): Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola, tema-tema, dan hubungan yang muncul dari penyajian data. Interpretasi dilakukan untuk menjelaskan temuan, mengidentifikasi implikasi, dan merumuskan

rekomendasi. Kesimpulan yang ditarik kemudian diverifikasi dengan merujuk kembali ke data asli untuk memastikan validitas dan keandalan temuan. Proses ini bersifat iteratif, di mana kesimpulan awal dapat direvisi jika ditemukan bukti baru atau interpretasi yang lebih kuat.

- Interpretasi dalam Bentuk Apa: Interpretasi data dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Identifikasi Pola dan Tren: Misalnya, mengidentifikasi pola umum pergeseran mata pencarian nelayan dari perikanan ke pariwisata di berbagai wilayah pesisir Bali sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan lingkungan.
 - 2) Analisis Kausalitas: Menjelaskan hubungan sebab-akibat, seperti bagaimana pencemaran laut (penyebab) menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan (akibat) bagi nelayan.
 - 3) Perbandingan dan Kontras: Membandingkan efektivitas *Awig-Awig* antara nelayan pribumi dan pendatang, serta menyoroti kontras antara konflik lahan dan inisiatif ekowisata di Serangan.
 - 4) Sintesis Temuan: Menggabungkan berbagai temuan dari studi kasus yang berbeda untuk membentuk gambaran komprehensif tentang tantangan multidimensional yang dihadapi Bendega dan respons adaptif mereka. Misalnya, menyatukan informasi tentang kerusakan hutan di Buleleng dengan isu lingkungan lainnya seperti pemutihan karang dan musim ikan tidak menentu untuk menyimpulkan dampak kumulatif perubahan iklim.
 - 5) Perumusan Implikasi: Menjelaskan dampak keberadaan dan dinamika Bendega terhadap pengelolaan sumber daya perikanan dan pariwisata, baik positif maupun negatif.
 - 6) Perumusan Rekomendasi: Berdasarkan interpretasi temuan, rekomendasi kebijakan dan program yang konkret dirumuskan untuk mengatasi isu-isu yang teridentifikasi dan memperkuat keberlanjutan Bendega.

Verifikasi Kesimpulan: Setiap kesimpulan dan interpretasi diverifikasi dengan merujuk kembali ke data asli yang telah direduksi dan disajikan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Asal-Usul Kelembagaan Bendega

1. Akar Tradisional dan Filosofi Tri Hita Karana sebagai Landasan

Bendega adalah sebuah lembaga tradisional yang berakar kuat dalam masyarakat adat di Bali, khususnya di wilayah pesisir. Kelembagaan ini tidak hanya berfungsi dalam bidang kelautan dan perikanan, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang mendalam. Secara historis, Bendega terus tumbuh dan berkembang seiring dengan budaya dan kearifan lokal Bali yang telah berlangsung selama berabad-abad (Siki, 2018). Kelembagaan ini merupakan salah satu dari tiga pilar utama masyarakat adat di Bali, sejajar dengan Desa Adat dan Subak (Siki, 2018). Desa Adat sendiri telah ada sejak zaman Bali Kuna,

di mana ia dikenal dengan sebutan "thani" (Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 2021). Meskipun masyarakat Bali pada umumnya dikenal sebagai masyarakat agraris dengan sistem irigasi Subak yang terkenal sejak abad ke-10 Masehi (Utomo, 2021), keberadaan aturan terkait transportasi laut dan hukum adat seperti Tawan Karang sejak abad ke-10 Masehi menunjukkan bahwa aktivitas maritim dan pengelolaannya juga telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka sejak lama (Utomo, 2021). Struktur organisasi Bendega disajikan pada Gambar 1.



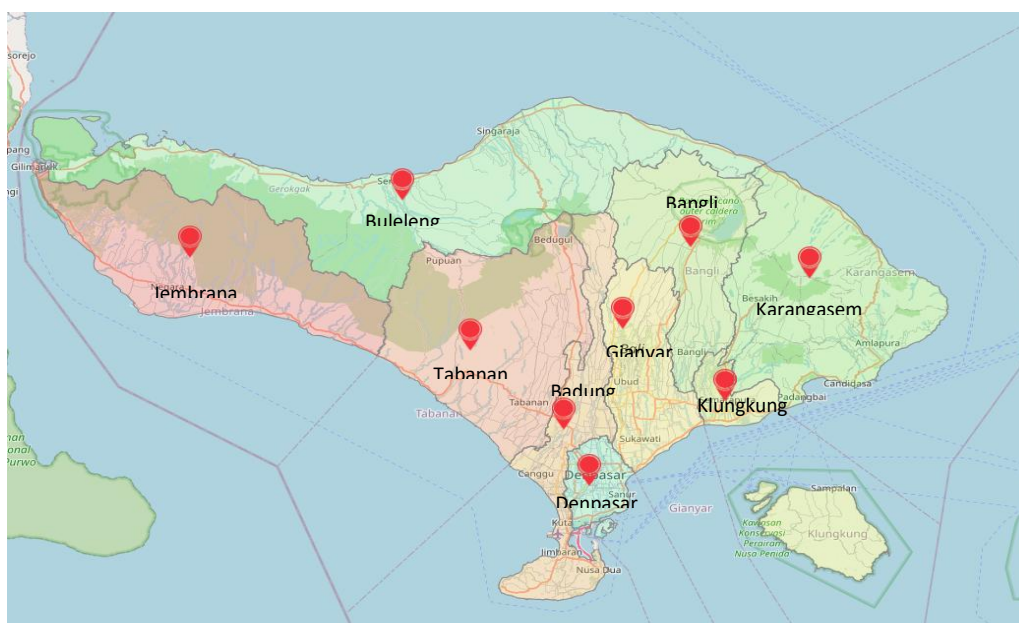
Gambar 1. Struktur Organisasi Bendega

Struktur pada gambar di atas menjelaskan kedudukan kelembagaan Bendega dalam tatanan pemerintahan formal dan hukum adat di Bali. Struktur ini menunjukkan bahwa Bendega bukanlah organisasi yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara hierarkis di bawah Desa Adat dan diakui secara langsung oleh Pemerintah Daerah. Hubungan antarlembaga ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Pemerintah Daerah dan Desa Adat:** Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berperan sebagai payung hukum formal. Relasi ini diwujudkan melalui "Pengakuan & Perlindungan", yang artinya pemerintah mengakui keberadaan dan kewenangan Desa Adat sebagai subjek hukum masyarakat adat. Selain itu, pemerintah juga memberikan "Pembinaan Formal", seperti fasilitasi, penguatan kapasitas, dan bantuan administratif, untuk memastikan Desa Adat dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum nasional.
- 2) **Desa Adat sebagai Payung Kelembagaan:** Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat utama di Bali yang memiliki otonomi untuk mengatur wilayah (wewidangan) dan kehidupannya sendiri berdasarkan hukum adat (awig-awig). Dalam struktur ini, Desa Adat berfungsi sebagai induk dari berbagai lembaga adat yang lebih spesifik di wilayahnya, termasuk Subak dan Bendega.
- 3) **Posisi Bendega:** Bendega secara struktural berada di bawah naungan Desa Adat. Ia adalah lembaga adat yang secara spesifik bertugas mengelola potensi dan sumber daya di wilayah laut dan pesisir (kelautan & perikanan) milik Desa Adat. Sama seperti Subak yang mengatur irigasi dan pertanian, Bendega memiliki aturan-aturan (awig-awig atau perarem) sendiri terkait aktivitas nelayan, zona penangkapan ikan, hingga upacara keagamaan yang berhubungan dengan laut.

Peran dan fungsi Bendega secara fundamental berlandaskan pada falsafah Tri Hita Karana, sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang menekankan tiga hubungan harmonis: antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama manusia (Pawongan), dan manusia dengan lingkungannya (Palemahan) (Meinarni et al., 2021). Filosofi ini tidak hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga panduan strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan religius masyarakat pesisir (Perda Prov Bali No. 11 tahun 2017). Keterkaitan erat Bendega dengan filosofi Tri Hita Karana dan posisinya sebagai salah satu dari tiga pilar kelembagaan adat Bali menunjukkan bahwa Bendega bukan sekadar organisasi profesi nelayan. Ia adalah entitas sosio-religius dan budaya fundamental yang mewujudkan cara hidup, nilai-nilai, dan struktur tata kelola tradisional untuk domain maritim, setara dengan peran Subak dalam pertanian. Oleh karena itu, setiap tantangan terhadap eksistensi atau fungsi Bendega, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan, secara inheren mengancam integritas budaya dan spiritual Bali yang lebih luas. Hal ini mengangkat signifikansi tantangan yang dihadapi Bendega dari masalah praktis semata menjadi isu yang memiliki dimensi kultural dan eksistensial yang mendalam.

Pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional Bendega telah diperkuat melalui kerangka hukum modern. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega secara eksplisit mengakui dan menghormati keberadaan lembaga ini beserta hak-hak tradisionalnya (Siki, 2018). Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi Bendega dan menegaskan posisinya dalam sistem pemerintahan daerah. Namun, penegasan posisi Bendega ini masih bergantung pada pengakuan lebih lanjut melalui pemerintahan pada tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan penelusuran terbaru (Tabel 1), diantara seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, hanya Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar yang kini memiliki peraturan turunan tentang bendega di wilayah administrasinya. Bertambah dua kabupaten, dibandingkan studi dari Wibawa (2020).



Gambar 2. Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Sumber: Bali Satu Data (2024)

Tabel 1. Jumlah desa adat, awig-awig, dan status kepemilikan perda bendega pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali

Kabupaten	Desa Adat	Awig-Awig	Perda Bendega
Kabupaten Jembrana	64	64	Belum ada
Kabupaten Tabanan	349	349	Belum ada
Kabupaten Badung	124	122	Perda Kab. Badung No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega
Kabupaten Gianyar	273	273	Perda Kab. Gianyar No. 10 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bendega
Kabupaten Klungkung	125	122	Belum ada
Kabupaten Bangli	170	168	Belum ada
Kabupaten Karangasem	190	190	Perda Kab. Karangasem No. 10 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bendega
Kabupaten Buleleng	170	170	Belum ada
Kota Denpasar	35	35	Perda Kota Denpasar No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega

Sumber : Bali Satu Data (2024), diolah kembali

2. Evolusi dan Peran Bendega dalam Struktur Masyarakat Adat Bali

Bendega memiliki struktur organisasi yang khas dan mirip dengan organisasi sosial tradisional Bali lainnya, seperti Banjar dan Subak. Kelembagaan ini terdiri dari Prajuru, yaitu pengurus organisasi, dan Krama, yaitu para anggotanya (Meinarni et al., 2021). Krama Bendega adalah individu-individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan religius di wilayah pesisir, menjalankan hak perikanan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali (KataBali, 2019; Meinarni et al., 2021). Struktur ini memastikan adanya tata kelola internal dan mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis komunitas.

Evolusi Bendega dapat diamati melalui studi kasus di berbagai wilayah, yang menunjukkan bagaimana modernisasi dan pembangunan dapat memengaruhi eksistensinya. Di Desa Tuban, misalnya, keberadaan Bendega telah berkembang dan menjadi profesi yang bernilai sebelum tahun 1930-an. Namun, lintasan historisnya berubah drastis setelah pembangunan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekitar tahun 1969. Pembangunan ini secara signifikan menyempitkan ruang lingkup kerja Bendega, mendorong banyak anggotanya untuk beralih profesi ke sektor pariwisata yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan pendangkalan laut pada tahun 1970-an akibat perluasan lahan bandara, yang semakin melemahkan keberadaan Bendega di Desa Adat Tuban. Puncaknya terjadi pada tahun 1990, ketika pelebaran jalan *bypass* di daerah Tuban menyebabkan Bendega mengalami "mati suri." Perkembangan industri pariwisata yang

semakin kuat di Bali selatan pada akhirnya membuat profesi Bendega ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Adat Tuban (Meinarni et al., 2021).

Studi kasus Desa Tuban secara jelas menunjukkan bagaimana modernisasi dan perkembangan infrastruktur pariwisata dapat secara langsung mengikis eksistensi kelembagaan Bendega dan mata pencarian tradisional. Fenomena ini bukan hanya insiden lokal yang terisolasi, melainkan sebuah pola yang berulang di berbagai wilayah pesisir Bali yang mengalami pembangunan pesat. Ini mengindikasikan adanya tren sistematis di mana pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pariwisata seringkali mengorbankan sektor tradisional. Analisis ini menyoroti kerentanan lembaga adat terhadap kekuatan ekonomi eksternal dan pentingnya kebijakan yang mampu menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian budaya dan mata pencarian lokal. Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 bertujuan untuk melindungi dan melestarikan Bendega (Rinihapsari, 2023; Suparta, 2017), tantangan historis seperti di Tuban menggarisbawahi perlunya implementasi yang kuat dan adaptif.

3. Peran Awig-Awig dalam Pengelolaan Tradisional Sumber Daya Kelautan

Salah satu instrumen kunci dalam tata kelola tradisional Bendega adalah Awig-Awig. Setiap Bendega diwajibkan memiliki Awig-Awig, yang merupakan seperangkat peraturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat nelayan. Awig-Awig ini dibentuk dan disahkan oleh Krama Bendega melalui mekanisme musyawarah yang disebut paruman, dan kemudian harus dicatatkan di Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengakuan formal (Perda Prov. Bali No. 11 tahun 2017).



Gambar 3. Awig-awig
(Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, 2021)

Landasan hukum dan filosofis Awig-Awig sangatlah kuat. Ia harus berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya, menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Lebih dari itu, Awig-Awig harus mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan selaras dengan Awig-Awig Desa Pakraman, memastikan bahwa aturan-aturan tersebut relevan dengan konteks budaya setempat (Majelis Desa Adat Provinsi Bali, 2021). Inti dari

Awig-Awig adalah filosofi Tri Hita Karana, yang berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku dalam interaksi sosial, menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya (Widyastini & Arya Hadi Dharmawan, 2013).

Sebagai contoh, Awig-Awig di Kedonganan mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan nelayan dan pengelolaan sumber daya laut. Aturan-aturan ini mencakup larangan penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak, seperti pukat harimau, bom, potasium, dan bahan kimia berbahaya lainnya; larangan mengambil biota laut yang dilindungi; larangan melaut pada Hari Raya Nyepi dan saat berlangsungnya upacara keagamaan setempat; serta larangan membuang sampah di sekitar pantai dan pesisir (Widyastini & Arya Hadi Dharmawan, 2013).

Meskipun Awig-Awig diakui secara hukum dan berfungsi sebagai pedoman pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, efektivitasnya dalam praktik menunjukkan kontradiksi. Analisis implementasi menunjukkan bahwa aturan yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang kuat, seperti larangan penangkapan ikan merusak atau larangan melaut saat Nyepi, sangat ditaati oleh nelayan pribumi, dengan tingkat pelanggaran mendekati 0%. Kepatuhan ini didukung oleh sanksi adat dan pemerintah yang tegas, serta sosialisasi yang intensif. Namun, aturan yang memerlukan adaptasi perilaku atau berbenturan dengan kepentingan ekonomi, seperti larangan membuang sampah atau larangan melaut saat upacara bagi nelayan pendatang, cenderung kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas (misalnya tempat sampah), pengawasan yang tidak konsisten, sanksi yang ringan, perbedaan budaya, dan kekhawatiran akan kehilangan pendapatan (Wibawa, 2020; Widyastini & Arya Hadi Dharmawan, 2013).

Variasi efektivitas ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap hukum adat sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai budaya dan tekanan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; efektivitasnya bergantung pada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diinternalisasi oleh komunitas, serta bagaimana tantangan praktis dan ekonomi diatasi. Kesenjangan antara niat kebijakan dan realitas di lapangan merupakan area krusial yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Isu dan Tantangan Terkini yang Dihadapi Kelembagaan Bendega

Kelembagaan Bendega di Bali saat ini menghadapi serangkaian isu dan tantangan kompleks yang mengancam eksistensi dan efektivitasnya dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tantangan ini berasal dari dampak modernisasi, degradasi lingkungan, kendala implementasi kebijakan, dan konflik kepentingan.

1. Dampak Modernisasi dan Perkembangan Pariwisata terhadap Eksistensi Bendega

Perkembangan industri pariwisata di Bali, sebagai ciri utama kemajuan modernisasi dan globalisasi, telah mendorong perubahan sosial yang signifikan selama empat dekade terakhir (Soeriadiredja, 2019). Salah satu dampak paling menonjol adalah pergeseran mata pencarian masyarakat pesisir. Di banyak wilayah, seperti Desa Tuban dan Pulau Nusa Lembongan,

profesi nelayan atau petani rumput laut telah ditinggalkan demi pekerjaan di sektor pariwisata, yang menawarkan penghasilan yang secara signifikan lebih tinggi (Meinarni et al., 2021). Di Tuban, pembangunan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada tahun 1969, pendangkalan laut, dan pelebaran jalan bypass pada tahun 1990 secara fisik menyempitkan ruang gerak dan wilayah kerja Bendega, bahkan menyebabkan profesi nelayan tradisional mengalami "mati suri" dan akhirnya ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat.

Pergeseran mata pencarian dari sektor perikanan tradisional ke pariwisata merupakan tren dominan yang didorong oleh disparitas ekonomi. Meskipun menawarkan peningkatan pendapatan bagi individu yang beralih profesi, tren ini secara kolektif mengikis basis anggota aktif Bendega. Hal ini berpotensi menyebabkan hilangnya pengetahuan tradisional tentang laut, praktik pengelolaan sumber daya yang telah diwariskan turun-temurun, dan bahkan ritual-ritual adat yang terkait dengan kehidupan nelayan. Ini merupakan ancaman struktural terhadap keberlanjutan Bendega sebagai lembaga budaya dan ekonomi, karena fungsi praktis dan partisipasi aktif anggotanya dalam kegiatan perikanan tradisional dapat berkurang seiring waktu.

Selain itu, pembangunan fasilitas pariwisata yang pesat seringkali menyebabkan alih fungsi lahan pesisir, termasuk lahan pertanian, yang mengancam ketahanan pangan dan keberlangsungan mata pencarian tradisional (Suarjaya, 2022). Ekspansi pariwisata yang tidak terkendali dapat menciptakan tekanan besar pada sumber daya lahan dan laut yang secara tradisional menjadi tumpuan hidup masyarakat Bendega.

2. Isu Lingkungan: Pencemaran Laut, Overfishing, dan Pengaruh Perubahan Iklim

Isu-isu lingkungan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup Bendega dan sumber daya perikanan di Bali.

a. Pencemaran Laut

Pencemaran air laut telah menyebabkan dampak yang merugikan. Di Bali selatan, pembuangan limbah pasir dan lumpur oleh Pelindo III di dekat bibir pantai telah menyebabkan penurunan drastis hingga 90% hasil tangkapan ikan, khususnya ikan tongkol, yang kabur dari habitatnya. Ini sangat merugikan nelayan lokal yang masih mengandalkan sistem penangkapan tradisional (Warta Bali, 2022). Selain itu, pencemaran sampah, baik plastik maupun organik, di perairan seperti Teluk Benoa merusak habitat vital seperti terumbu karang, menurunkan kualitas air (misalnya, melalui penurunan kadar oksigen dan pelepasan zat kimia berbahaya), dan secara keseluruhan berdampak negatif pada sektor perikanan dan pariwisata (Peranginangin et al., 2025; Prasetyo, 2021).

b. Overfishing

Fenomena penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) telah terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, termasuk Selat Bali, di mana tingkat penangkapan ikan melebihi potensi stok ikan. Kondisi ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan pesisir serta menurunkan produktivitas perikanan (Roisah et al., 2023). Secara global, sekitar 34% stok ikan telah mengalami *overfished*, dan 58% lainnya telah mencapai batas maksimum berkelanjutan, menunjukkan skala masalah yang luas (Mordhorst, 2021). Indikator *overfishing* meliputi

peningkatan upaya penangkapan, penurunan hasil tangkapan per unit upaya, ukuran ikan yang semakin kecil, dan keharusan nelayan untuk melaut semakin jauh atau dalam untuk mendapatkan hasil (Roisah et al., 2023).

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim membawa dampak signifikan yang memicu musim ikan tidak menentu, mengakibatkan penurunan drastis produksi dan hasil tangkapan (Mustika, 2022). Peningkatan suhu air laut memicu pemutihan karang (*coral bleaching*), sementara peningkatan keasaman laut menghambat pembentukan karang, dan intensitas badai serta gelombang yang meningkat merusak struktur terumbu karang yang vital sebagai habitat ikan (Kusumaningrum et al., 2024). Di Buleleng, penyusutan air Danau Tamblingan dan Buyan sekitar 4 meter dalam dua tahun terakhir diduga akibat kerusakan hutan di wilayah Catur Desa, yang mengancam krisis air di daerah hilir (Kanal Bali, 2021)

Isu-isu lingkungan seperti pencemaran, *overfishing*, dan dampak perubahan iklim tidak berdiri sendiri; mereka saling terkait dan menciptakan tekanan kumulatif yang parah pada ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Pencemaran mengurangi habitat dan kualitas air, membuat ikan menjauh atau mati; *overfishing* mempercepat penipisan stok ikan yang sudah tertekan; dan perubahan iklim menambah ketidakpastian serta merusak fondasi ekosistem (misalnya, terumbu karang dan hutan mangrove). Ini adalah krisis multi-dimensi yang memerlukan pendekatan pengelolaan terpadu dan lintas sektor, karena mengatasi satu isu secara terpisah tidak akan cukup untuk memulihkan kesehatan ekosistem dan keberlanjutan mata pencarian nelayan.

3. Tantangan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Bendega

Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen untuk melindungi kelembagaan Bendega melalui pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega. Perda ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan Bendega, hak-hak tradisionalnya, serta wilayah pesisir dari klaim atau kepemilikan oleh investor pariwisata (Siki, 2018; Wibawa, 2020). Namun, implementasi Perda ini di lapangan masih belum maksimal karena beberapa faktor kunci:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kabupaten Badung, sebagai salah satu instansi pelaksana, menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi Perda Bendega, terutama jika dihubungkan dengan luas layanan yang harus dicakup di wilayah pesisir (Suarjaya, 2022).

b. Alih Fungsi Lahan Pesisir

Belum terwujudnya tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal karena semakin banyak alih fungsi wilayah pesisir untuk pembangunan fasilitas kepariwisataan. Hal ini menciptakan konflik penggunaan lahan dan mengurangi area tangkap tradisional nelayan (Suarjaya, 2022).

c. Minimnya Sosialisasi

Sosialisasi mengenai Perda Bendega masih jarang dilakukan kepada masyarakat nelayan dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga banyak yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka di bawah peraturan ini (Suarjaya, 2022).

d. Ketidaksinkronan Pelaksanaan

Terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan Perda Bendega di lapangan, yang berimbas pada belum sejahteranya nelayan dan masyarakat pesisir. Wilayah tangkap mereka seringkali terdesak oleh kehadiran fasilitas pariwisata, menyebabkan marginalisasi (Rinihapsari, 2023).

Keberadaan Perda Bendega menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi lembaga tradisional dan hak-hak nelayan. Namun, kendala implementasi yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya (manusia dan finansial), prioritas penggunaan lahan yang saling bertentangan (pariwisata vs. perikanan), dan jangkauan sosialisasi yang tidak memadai, menciptakan kesenjangan besar antara niat kebijakan dan realitas di lapangan. Kesenjangan ini menyebabkan nelayan dan masyarakat pesisir tetap rentan terhadap marginalisasi dan kehilangan akses terhadap sumber daya, meskipun ada payung hukum yang seharusnya melindungi mereka.

4. Konflik Kepentingan dan Akses Terhadap Wilayah Pesisir

Konflik kepentingan dan perebutan akses terhadap wilayah pesisir merupakan tantangan berulang yang dihadapi Bendega. Konflik ini seringkali terjadi antara masyarakat lokal/nelayan dengan pengusaha pariwisata terkait pemanfaatan dan akses terhadap lahan pesisir. Masalah yang muncul meliputi penggunaan lahan parkir perahu nelayan yang berbenturan dengan pembangunan hotel yang melewati sempadan pantai, serta tumpang tindih kewenangan dalam pemanfaatan ruang (Natih et al., 2020; Rinihapsari, 2023). Contoh nyata dari konflik lahan terjadi di Pantai Bingin, di mana warga yang telah mengelola lahan sejak tahun 1960 untuk pertanian dan nelayan keberatan dengan pembongkaran bangunan usaha mereka yang dianggap ilegal (Kertawedangga & Resa, 2025). Serta Kasus di Serangan menyoroti dinamika konflik antara nelayan tradisional dengan pengusaha properti yang melakukan upaya privatisasi pesisir (Balinews, 2025).

Konflik berulang terkait akses dan pemanfaatan wilayah pesisir ini mengungkapkan ketidakseimbangan kekuatan yang mendasar, di mana kepentingan pembangunan pariwisata skala besar seringkali mendominasi hak-hak tradisional komunitas lokal, bahkan mengabaikan regulasi dan imbauan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya konflik struktural antara model pertumbuhan ekonomi yang agresif, yang cenderung mengarah pada privatisasi dan eksklusivitas, dengan upaya pelestarian budaya serta mata pencarian tradisional yang bersifat komunal dan terbuka. Resolusi konflik semacam ini memerlukan lebih dari sekadar mediasi; ia menuntut evaluasi ulang prioritas pembangunan dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak tradisional.

Tabel 2. Isu dan Tantangan Utama Bendega di Berbagai Wilayah Studi

Wilayah	Isu/Tantangan Spesifik	Implikasi
Buleleng	Penyusutan air Danau Tamblingan dan Buyan akibat kerusakan hutan; Keterbatasan SDM untuk sosialisasi Perda Bendega.	Krisis air di daerah hilir; Implementasi Perda Bendega tidak optimal.
Serangan	Konflik pengusiran nelayan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) dari laguna pantai; Pergeseran mata pencarian dari nelayan ke jasa pariwisata.	Marginalisasi nelayan tradisional; Potensi hilangnya akses publik ke pantai; Perubahan struktur ekonomi lokal.
Teluk Jimbaran	Transformasi dari desa nelayan menjadi pusat kuliner bahari; Tantangan implementasi Awig-Awig bagi nelayan pendatang dan masalah kebersihan.	Perubahan identitas desa; Kesenjangan efektivitas hukum adat; Potensi konflik sosio-kultural.
Nusa Dua	Pengembangan kawasan resort mewah; Potensi privatisasi pantai oleh investor pariwisata.	Ketegangan antara pembangunan pariwisata dan hak akses tradisional; Perlunya perlindungan hukum yang kuat untuk area publik.
Tanjung Benoa	Pencemaran laut parah (sampah, limbah pengerukan); Kontroversi reklamasi Teluk Benoa untuk fasilitas pariwisata mewah.	Kerusakan habitat laut dan penurunan hasil tangkapan; Ancaman terhadap ekosistem mangrove dan padang lamun; Konflik lingkungan dan sosial.

Implikasi pada Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Kelembagaan Bendega memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di Bali, baik melalui praktik tradisional yang dipertahankan maupun adaptasi dan inovasi yang dikembangkan.

1. Praktik Pengelolaan Perikanan Tradisional dan Adaptasinya

Pengelolaan perikanan tradisional di Bali sangat terikat pada hak dan kewajiban nelayan yang diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017, yang berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana (Meinarni et al., 2021). Salah satu manifestasi paling konkret dari pengelolaan ini adalah keberadaan Awig-Awig. Di Kedongan, misalnya, Awig-Awig secara spesifik melarang penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak seperti bom, bahan kimia beracun, dan pukat harimau. Selain itu, ia juga melarang pengambilan biota laut yang dilindungi, serta kegiatan melaut pada Hari Raya Nyepi atau saat upacara keagamaan setempat (Widyastini & Arya Hadi Dharmawan, 2013). Aturan-aturan ini menunjukkan pendekatan konservasi yang mendalam, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan menghormati siklus alam serta spiritual.

Efektivitas aturan-aturan ini sangat terlihat pada nelayan pribumi, di mana larangan penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak memiliki tingkat pelanggaran 0%. Kepatuhan tinggi ini didukung oleh pemahaman bahwa laut adalah anugerah Tuhan yang harus dilindungi, serta adanya sanksi adat dan pemerintah yang tegas dan patroli yang konsisten. Demikian pula, larangan melaut saat Nyepi sangat efektif karena merupakan hari suci bagi umat Hindu (Widyastini & Arya Hadi Dharmawan, 2013).

Meskipun menghadapi tekanan eksternal dari modernisasi dan isu lingkungan, praktik pengelolaan tradisional yang berakar pada Tri Hita Karana ini terus menunjukkan tingkat efektivitas tertentu dalam mempromosikan perikanan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, terutama di kalangan komunitas adat. Hal ini menggarisbawahi relevansi kearifan lokal yang abadi dan terus relevan dalam pengelolaan sumber daya, yang seringkali menawarkan solusi adaptif dan holistik yang melampaui pendekatan regulasi modern semata.

2. Peran Bendega dalam Konservasi dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan

Sebagai lembaga, Bendega memiliki tanggung jawab yang luas dalam perlindungan dan pelestarian aspek Parhyangan (tempat suci), Pawongan (hubungan antar manusia), dan Palemahan (lingkungan) (Meinarni et al., 2021; Siki, 2018). Ini mencakup kewajiban untuk menjaga wilayah pesisir dan laut berdasarkan kearifan lokal, serta memanfaatkan dan melestarikan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan modern, beberapa komunitas Bendega dan inisiatif terkait telah menunjukkan kapasitas adaptif dan inovatif yang luar biasa dalam upaya konservasi dan keberlanjutan.

Salah satu contoh inovasi adalah Bendega.id, sebuah "kelompok nelayan digital" yang berfokus pada perbaikan ekosistem perairan (laut, sungai, danau) dan peningkatan nilai tukar nelayan (Kanal Bali, 2022). Inisiatif ini secara aktif mengatasi kerusakan pada ekosistem vital seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Bendega.id telah berhasil menanam 416.000 bibit mangrove di lahan seluas 58 hektar di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa, sekaligus mengembangkan produk olahan dari buah mangrove (seperti brownies "MANGBROW," keripik "MANGSIP," dan stik "MANGTIK") untuk meningkatkan nilai ekonomi mangrove dan pendapatan nelayan.

Di Serangan, Kelompok Nelayan Karya Segara menjadi contoh nyata bagaimana komunitas nelayan dapat memimpin upaya konservasi. Kelompok ini secara aktif merehabilitasi kondisi pesisir dengan menanam terumbu karang dan berhasil membudidayakan kuda laut, bahkan membangun zona ekowisata terapung yang disebut Green Island (Pandawani et al., 2014). Visi mereka adalah mengintegrasikan pembangunan pariwisata, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan pelestarian ekosistem secara bersamaan.

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa di luar peran tradisionalnya, beberapa komunitas Bendega secara proaktif berinovasi dan beradaptasi terhadap tantangan modern. Mereka tidak hanya terlibat dalam konservasi aktif (penanaman mangrove dan restorasi karang) tetapi juga mendiversifikasi aliran pendapatan melalui ekowisata dan produk bernilai tambah. Pendekatan proaktif ini merupakan bukti ketahanan dan kapasitas adaptif mereka dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

3. Diversifikasi Mata Pencarian dan Inovasi Komunitas Nelayan

Penurunan hasil tangkapan ikan tradisional akibat isu lingkungan dan meningkatnya persaingan telah mendorong banyak nelayan Bali untuk melakukan diversifikasi mata pencarian. Strategi adaptasi ini menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan ekonomi mereka.

Di Serangan, misalnya, banyak nelayan telah beralih dari penangkapan ikan sebagai mata pencarian utama menjadi penyedia jasa konservasi dan ekowisata kepada wisatawan. Mereka memandu turis untuk menanam terumbu karang, melepaskan kuda laut hasil budidaya, dan menyusuri hutan mangrove, yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan (Pandawani et al., 2014). Demikian pula di Nusa Lembangan, banyak masyarakat yang sebelumnya adalah petani rumput laut atau nelayan kini memilih bekerja di sektor pariwisata karena iming-iming penghasilan yang jauh lebih tinggi (Shantika & Mahagangga, 2018).

Selain beralih ke sektor pariwisata, beberapa nelayan juga mengambil pekerjaan sampingan seperti bertani, beternak, atau menjadi pengumpul, yang secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka (Wijayanti et al., 2023). Inovasi juga terlihat dalam pengembangan produk bernilai tambah dari sumber daya laut, seperti produk olahan buah mangrove (brownies, keripik, stik) yang dikembangkan oleh Bendega.id (Kanal Bali, 2022).

Diversifikasi mata pencarian, seringkali ke dalam kegiatan yang terkait dengan pariwisata atau pengolahan sumber daya laut bernilai tambah, merupakan strategi adaptasi utama bagi nelayan Bali yang menghadapi penurunan hasil tangkapan tradisional dan tekanan ekonomi yang meningkat. Transisi ini, meskipun terkadang menyebabkan penurunan aktivitas penangkapan ikan tradisional, juga membuka jalan baru untuk stabilitas ekonomi dan pemberdayaan komunitas. Ini menunjukkan bahwa Bendega sebagai sebuah institusi tidaklah statis, melainkan terus beradaptasi dengan mengubah kegiatan ekonominya, terkadang menjauh dari perikanan murni, untuk memastikan kesejahteraan para anggotanya.

Implikasi pada Sektor Pariwisata

Interaksi antara kelembagaan Bendega dan sektor pariwisata di Bali merupakan dinamika yang kompleks, menghadirkan baik tantangan maupun peluang.

1. Interaksi Kelembagaan Bendega dengan Pengembangan Pariwisata Bahari

Pariwisata di Bali memiliki dampak ganda terhadap kelembagaan Bendega dan pengelolaan sumber daya perikanan. Di satu sisi, pengembangan pariwisata bahari dapat menjadi sumber konflik yang signifikan. Peraturan Daerah Bendega Nomor 11 Tahun 2017 memiliki peran krusial dalam melindungi pantai dari klaim atau kepemilikan oleh investor pariwisata, serta memastikan akses publik bagi nelayan dan mencegah privatisasi wilayah pesisir (Suparta, 2017). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan inheren antara kepentingan pengembangan pariwisata skala besar dan hak-hak tradisional komunitas lokal.

Namun, di sisi lain, pariwisata juga menawarkan peluang besar untuk diversifikasi ekonomi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan. Di Serangan, Kelompok Nelayan Karya Segara telah berhasil mengintegrasikan konservasi dengan pariwisata melalui model ekowisata. Mereka menawarkan kegiatan seperti penanaman terumbu karang, pelepasan kuda laut, dan snorkeling kepada wisatawan, yang tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga mempromosikan pelestarian ekosistem laut (Pandawani et al., 2014). Model ini menunjukkan bagaimana peran tradisional dapat bertransformasi menjadi usaha baru yang berkelanjutan.

Di Teluk Jimbaran, desa-desa nelayan tradisional telah bertransformasi menjadi pusat kuliner bahari yang terkenal, dengan banyaknya kafe dan restoran hidangan laut yang menarik wisatawan (Soeriadiredja, 2019). Sementara itu, di Buleleng, nelayan lokal (bendega) berperan sebagai pemandu untuk tur kano di Danau Tamblingan, menunjukkan keindahan alam dan situs-situs suci kepada pengunjung (Jaya & Mahagangga, 2018).

Interaksi pariwisata dengan Bendega memiliki dampak ganda. Ia dapat menjadi sumber konflik atas akses pesisir dan wilayah penangkapan ikan tradisional, namun juga menawarkan peluang untuk diversifikasi ekonomi dan ekowisata berbasis konservasi, mengubah peran tradisional menjadi usaha baru yang berkelanjutan. Hasil dari interaksi ini sangat bergantung pada bagaimana pengembangan pariwisata dikelola dan apakah komunitas lokal diberdayakan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat secara adil, alih-alih hanya digusur.

2. Dampak Pariwisata terhadap Mata Pencarian dan Budaya Nelayan

Meskipun pariwisata menawarkan peluang ekonomi yang menggiurkan, dampaknya terhadap mata pencarian dan budaya nelayan tradisional seringkali kompleks dan berpotensi merugikan. Perkembangan pariwisata yang pesat telah menyebabkan pergeseran mata pencarian yang meluas, di mana banyak nelayan dan petani rumput laut beralih ke pekerjaan di sektor pariwisata karena iming-iming penghasilan yang lebih tinggi (Shantika & Mahagangga, 2018). Di Desa Tuban, industri pariwisata yang kuat bahkan menyebabkan banyak masyarakat meninggalkan profesi nelayan sama sekali (Meinarni et al., 2021).

Pergeseran mata pencarian yang meluas ini berisiko mengikis pengetahuan leluhur, praktik budaya, dan identitas khas komunitas nelayan. Ketika semakin sedikit orang yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan tradisional, pengetahuan tentang musim ikan, teknik penangkapan yang berkelanjutan, dan ritual-ritual adat yang terkait dengan laut dapat memudar. Ini merupakan bentuk erosi sosio-kultural yang halus namun mendalam, di mana praktik Bendega sebagai sebuah cara hidup dapat berkurang meskipun institusinya secara formal masih ada.

Selain itu, konflik atas penggunaan lahan pesisir antara kepentingan pariwisata dan aktivitas tradisional sering terjadi (Natih et al., 2020). Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada komunitas nelayan, yang merasa terpinggirkan dari wilayah yang secara historis menjadi sumber kehidupan dan identitas mereka.

3. Potensi Integrasi Berkelanjutan antara Perikanan dan Pariwisata

Melihat dinamika yang kompleks, potensi integrasi berkelanjutan antara sektor perikanan dan pariwisata menjadi sangat penting untuk masa depan Bendega dan Bali secara keseluruhan. Model-model yang berhasil menunjukkan bahwa sinergi ini dapat dicapai.

Kelompok Nelayan Karya Segara di Serangan adalah contoh utama dari integrasi yang sukses, di mana konservasi dan pariwisata berjalan seiring (Pandawani et al., 2014). Mereka membuktikan bahwa komunitas lokal, dengan pengetahuan dan inisiatifnya, dapat memimpin pengembangan ekowisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pelestarian ekosistem laut.

Konsep "Pariwisata Kerta Masa," yang mengusulkan pariwisata yang selaras dengan siklus alam dan musim, merupakan gagasan alternatif terhadap pariwisata yang berorientasi kuantitas semata (Hadi Santosa & Nadira Saraswati, 2020). Pendekatan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pariwisata dan lingkungan, serta mendukung praktik-praktik tradisional. Upaya pemerintah untuk menetapkan kawasan konservasi laut dan mempromosikan strategi pariwisata berkelanjutan juga menunjukkan pengakuan akan perlunya integrasi ini (Hadi Santosa & Nadira Saraswati, 2020; Mahmud et al., 2015; Subekti, 2020).

Potensi integrasi berkelanjutan antara perikanan dan pariwisata terletak pada model yang memberdayakan komunitas lokal (Bendega) untuk memimpin inisiatif ekowisata, sehingga menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan yang saling menguntungkan. Ini memerlukan pergeseran dari pariwisata yang bersifat ekstraktif semata menjadi model yang menghargai dan mengintegrasikan pengetahuan ekologis lokal serta upaya konservasi. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi katalis untuk pelestarian budaya dan lingkungan, alih-alih menjadi penyebab konflik dan degradasi.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjamin keberlanjutan kelembagaan Bendega serta pengelolaan sumber daya perikanan dan pariwisata di Bali secara harmonis, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penguatan implementasi Peraturan Daerah ditingkat Kabupaten atau Kota, bahkan distruktural paling bawah terkait Bendega menjadi krusial, termasuk penyediaan sumber daya yang memadai serta penguatan koordinasi antara pemerintah, desa adat, dan sektor swasta guna mencegah marginalisasi nelayan dan konflik pemanfaatan ruang pesisir. Di sisi lain, integrasi antara hukum adat dan hukum negara perlu diperkuat melalui pengakuan formal terhadap Awig-Awig yang adaptif dan selaras dengan nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana. Selain itu, diversifikasi ekonomi nelayan melalui pelatihan, pendampingan, serta inovasi produk hasil laut bernilai tambah perlu didorong guna meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Upaya konservasi ekosistem laut seperti restorasi mangrove dan terumbu karang, serta penegakan hukum terhadap pencemaran, juga menjadi prioritas, seiring dengan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Keseluruhan kebijakan tersebut harus dirancang dalam kerangka pengelolaan zona pesisir terpadu yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan

menempatkan partisipasi aktif komunitas Bendega sebagai pusat pengambilan keputusan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial jangka panjang.

Simpulan

Kelembagaan Bendega di Bali merupakan institusi sosio-kultural berbasis filosofi Tri Hita Karana yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Meskipun telah memperoleh legitimasi formal, Bendega menghadapi tekanan dari ekspansi pariwisata, degradasi lingkungan, serta lemahnya implementasi kebijakan yang mengakibatkan marginalisasi nelayan dan konflik kepentingan. Namun demikian, Bendega menunjukkan ketahanan melalui pelestarian norma adat dan inovasi ekonomi, seperti ekowisata dan hilirisasi produk perikanan. Keberlanjutannya bergantung pada sinergi antara kearifan lokal dan modernisasi, serta dukungan kebijakan yang responsif dan berkeadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana atas dukungan dan fasilitas pendukung selama penelitian.

Daftar Pustaka

- Bali Satu Data. (2024). Rekapitulasi Jumlah Desa Adat yang Sudah Memiliki Awig-Awig. *Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali*. <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/rekapitulasi-jumlah-desadadat-yangsudahmemilikiawigawig?year=2024>
- Darma, I. G. K. I. P., Kusuma Dewi, M. I., & Kristina, N. M. R. (2020). Community Movement of Waste Use To Keep the Image of Tourism Industry in Gianyar. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 3(1), 49–57. <https://doi.org/10.17509/jithor.v3i1.23439>
- Dewi, N. G. A. S., Suardana, I. W., Sudiarta, I. N., Antara, I. K., Saputra, I. G. G., & Herayanti, S. (2015). Dampak Pariwisata Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Di Kawasan Tulamben Dan Candidasa Kabupaten Karangasem Provinsi Bali (Sebuah Analisis Sekunder Dalam Pro Poor Tourism). <https://tinyurl.com/ybnxfy6p>
- Hadi Santosa, A. A. G. D., & Nadira Saraswati, L. A. (2020). Pariwisata Kerta Masa: Gagasan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pariwisata Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 723–738. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p05>
- Jaya, I. G. F. P., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pengusaha Pariwisata Terkait Akses Pura Batu Mejan Dan Setra Di Desa Canggal, Kabupaten

- Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 55–65.
<https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v06.i01.p09>
- Kanal Bali. (2021). Diduga Akibat Kerusakan Hutan, 2 Danau di Buleleng, Bali, Alami Penyusutan Air. Kumparan. <https://kumparan.com/kanalbali/diduga-akibat-kerusakan-hutan-2-danau-di-buleleng-bali-alami-penyusutan-air-1w2KpFb76Qc/full>. Diakses 26 Juli 2025
- Kanal Bali. (2022). Lewat bendega.id, Fajar Hakim Ajak Nelayan Selamatkan Wilayah Pesisir. Kumparan. <https://kumparan.com/kanalbali/lewat-bendega-id-fajar-hakim-ajak-nelayan-selamatkan-wilayah-pesisir-1yLsh1sZZ3Z/full>. Diakses 26 Juli 2025
- KataBali. (2019). Badung Tindak lanjuti Perda Bali no 11 Tentang Bendega. KataBali.Com. <https://katabali.com/2019/01/badung-tindak-lanjuti-perda-bali-no-11-tentang-bendega/>. Diakses 26 Juli 2025
- Kertawedangga, & Resa, P. (2025). Konflik Lahan Pantai Bingin Bali: Warga Keberatan Pembongkaran, Sebut Sudah Kelola Sejak 1960 untuk Pertanian dan Nelayan. *Jembrana Express*. <https://tinyurl.com/mrxwf7k6>
- Kusumaningrum, I., Adinda Raraswati, P., Kurniasari, S., & Yuliani, S. (2024). Urgensi Pemulihan Terumbu Karang di Bali Secara Berkelanjutan. *Science Technology and Educational Research*, 1(3b), 751–763. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1734>
- Mahmud, A., Satria, A., & Kinseng, R. . (2015). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(3), 237–251. <https://doi.org/10.22146/jsp.13141>
- Majelis Desa Adat Provinsi Bali. (2021). Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat Di Bali. Dinas Pemajuan Desa Adat. https://dpma.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/PEDOMAN-PENYURATAN-AWIG-AWIG-DESA-ADAT-DI-BALI.-1_compressed.pdf. Diakses 26 Juli 2025
- Meinarni, N. P. S., Winatha, K. R., & Permana, I. P. H. (2021). Traditional Fishing Rights for Bendega (Balinese Traditional Fisherman). *Jurnal Hukum Prasada*, 8(2), 107–115. <https://doi.org/10.22225/jhp.8.2.2021.107-115>
- Mordhorst, K. (2021). In Indonesia, Illegal Fishing Hurts More Than Just Fish. U.S. Global Leadership Coalition. <https://www.usglc.org/blog/in-indonesia-illegal-fishing-hurts-more-than-just-fish/>. Diakses 26 Juli 2025
- Mustika, P. P. (2022). Perubahan Iklim Picu Musim Ikan Tidak Menentu. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/perubahan-iklim-picu-musim-ikan-tidak-menentu>. Diakses 26 Juli 2025
- Natih, D. R. N. K., Kasih, D. P. D., & Utama, I. B. P. (2020). Peran Desa Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Untuk Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Sanur Kaja). *Jurnal Kertha Desa*, 8(12), 59–68. <https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-90346>
- Ni Nyoman, A., Wedasuari, P. R., Bagiada, M., & Sudiadnyani, I. O. (2019). Developing of Sales Accounting Model Hotel Supplier on Growth Of Business Revenue. *International Journal*

- of Applied Sciences in Tourism and Events*, 3(2), 122.
<https://doi.org/10.31940/ijaste.v3i2.1365>
- Pandawani, N. P., Suryatmaja, I. B., & Andayani, M. E. (2014). Kelompok Nelayan Pelestari Terumbu Karang Pulau Serangan. *Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah*, 5(2), 62–67.
<https://www.neliti.com/publications/154913/kelompok-nelayan-pelestari-terumbu-karang-pulau-serangan>
- Peranginangin, A. B., Ernawati, N. M., & Saraswati, N. L. G. R. A. (2025). Kelimpahan Makro Debris Di Ekosistem Mangrove Teluk Benoa, Bali. *Journal of Marine Research*, 14(1), 54–61. <https://doi.org/10.14710/jmr.v14i1.46213>
- Prasetijo, R. (2021). Eksposisi Kualitas Air Laut pada Perairan Teluk Benoa, Bali. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 5(1), 6–13.
<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/1393>
- Provinsi Bali. 2017. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega. Pemerintah Provinsi Bali: Denpasar
- Rimba, A. B., Atmaja, T., Mohan, G., Chapagain, S. K., Arumansawang, A., Payus, C., & Fukushi, K. (2020). Identifying Land Use And Land Cover (LULC) Change From 2000 To 2025 Driven By Tourism Growth: A Study Case In Bali. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLIII-B3-2, 1621–1627. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B3-2020-1621-2020>
- Rinihapsari, K. A. A. M. (2023). Miliki Perda Bendega, Ini yang Dirasakan Nelayan Bali. *Radio Republik Indonesia (RRI)*. <https://tinyurl.com/3hnvj7at>. Diakses 26 Juli 2025
- Roisah, K., Rahayu, R., Yusliwidaka, A., Mubarak, Z., & Buditama, A. (2023). Legal Development in the Overcoming Overfishing in Indonesian Coastal Areas. *JILS*, 8(2), 1065. <http://dx.doi.org/10.15294/jils.v8i2.69358>
- Sambas, M., Pujilestari, S., Setyopratiño, L., & Kurniawati, R. (2022). Analysis of Lodging and Competition on the Island of Bali during Covid-19 with Big Data. *International Journal of Travel, Hospitality and Events*, 1(3), 214–228. <https://doi.org/10.56743/ijothe.v1i3.172>
- Shantika, B., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pulau Nusa Lembongan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 177. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2018.v06.i01.p27>
- Siki, R. M. (2018). Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda Tentang Bendega. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 375.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p08>
- Soeriadiredja, P. (2019). Strategi Masyarakat Nelayan Kedonganan Menghadapi Kemiskinan. *Jurnal Pustaka Ilmu-Ilmu Budaya*, 19(1), 33.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1722998&val=18606>
- Suarjaya, I. W. R. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung. *Jurnal Widya Publika*, 10(2), 157–175. <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v10i2.932>

- Subekti, S. (2019). Perjuangan Masyarakat Adat untuk Keadilan Ekologis di Teluk Benoa, Bali. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.53-67>
- Subekti, S. (2020). Kawasan Konservasi Maritim dan SDG 14: Prospek Teluk Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 4(1), 73–82. <https://doi.org/10.14710/endogami.4.1.73-82>
- Suparta, I. K. (2017). Perda Bendega Lindungi Keberadaan Pantai di Bali. *Antara Bali*. <https://bali.antaranews.com/berita/106680/perda-bendega-lindungi-keberadaan-pantai-di-bali>. Diakses 26 Juli 2025
- Utomo, B. B. (2021). Hukum Laut di Kerajaan Bali Kuno? *Koran Sulindo*. <https://koransulindo.com/hukum-laut-di-kerajaan-bali-kuno/>. Diakses 26 Juli 2025
- Warren, C. (2023). Between the Sea and a Hard Place: Fisheries Degradation and Livelihood Precarity in a West Bali Coastal Community. *The Paradox of Agrarian Change: Food Security and the Politics of Social Protection in Indonesia*, 221–248. <https://doi.org/10.2307/ji.3385991>
- Warta Bali. (2022). Dampak Pencemaran Air Laut, Hasil Tangkapan Nelayan Menurun, Jadi Atensi Dewan Bali. *Warta Bali*. <https://wartabalionline.com/2022/11/03/dampak-pencemaran-air-laut-hasil-tangkapan-nelayan-menurun-jadi-atensi-dewan-bali/>. Diakses 26 Juli 2025
- Wibawa, I. P. S. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Bendega Sebagai Organisasi Tradisional Nelayan Di Bali. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 20(1), 67–76. <https://doi.org/10.32795/ds.v20i1.643>
- Widyarsana, I. M. W., & Agustina, E. (2020). Waste Management Study In The Archipelago Tourism Area (Case Study: Nusa Penida District, Bali Province, Indonesia). *E3S Web of Conferences*, 148, 05002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014805002>
- Widyastini, T., & Arya Hadi Dharmawan. (2013). Efektivitas Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedongan Bali. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 37–51. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/66071>
- Wijayanti, L. P. D. A., Arthana, I. W., & Indrawan, G. S. (2023). Tingkat Kesejahteraan Nelayan Tradisional di Pantai Bias Lantang Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, Bali. *Journal of Marine Research and Technology*, 6(1), 46. <https://doi.org/10.24843/JMRT.2023.v06.i01.p07>